

Pendidikan Karakter Berbasis *Ta'dib*

Adian Husaini

Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor

Email: adianh@yahoo.com

Abstract

At the moment, Indonesian government campaigns for education based on character rapidly. Various theories have been proposed to make this mission success. Unfortunately, the government tends to use the secular's theories which so far from religious values, whereas Indonesia is the biggest nation with Muslims population in the world. Righteously, the education which based on character should be taken from this Religion's precepts. Actually, this idea has been engaged by the founding father of this country. In the principle's foundation of this country (Pancasila), the founding father formulate some principle which using Islamic terms. As an example, in second principle, we can find word 'Adil' and 'Adab' which both of these words is Islamic term that considered as Islamic basic vocabulary and closely related with Islam's precepts. Because of this importance, the founding father used this words and Islamic terms inside the principle's foundation of this country (Pancasila). These indicates how strong the influences of Islamic worldview in prefatory's constitution of this country (Pembukaan UUD 1945). Therefore, we have to understanding these Islamic terms (adab and adil) with Islamic worldview. Because of the importance of this 'Adab' term, then this is the time when the government use these term in implementation of education based on character in this country.

Keywords: Adab, Education, Character, Islamic Worldview

* Program Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kd. Badak Bogor 16162 Telp dan Fax: +62251 835-6884

Abstrak

Saat ini, Pemerintah Indonesia sangat gencar mengkampanyekan pendidikan berbasis karakter. Berbagai teori dikemukakan untuk mensukseskan misi tersebut. Sayangnya, Pemerintah cenderung menggunakan teori-teori sekuler yang jauh dari agama. Padahal, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Sudah selayaknya, pendidikan karakter diambil dari ajaran agama ini. Hal itu sebenarnya sudah ditanamkan oleh para pendiri Negara ini. Dalam perumusan Dasar Negara Indonesia (Pancasila), para pendiri Negara telah merumuskan sila-sila yang menggunakan istilah-istilah agama Islam. Sebagai contoh pada sila kedua, digunakan kata “adil” dan “adab”. Dalam Islam, istilah-istilah seperti *adab*, *adil*, *wakil*, *musyawarah*, dan lain sebagainya, tidak dipandang sebagai istilah yang tanpa makna. Istilah-istilah tersebut merupakan istilah kunci (*Islamic basic vocabulary*) dalam ajaran Islam, yang maknanya terkait erat dengan konsep ajaran Islam. Karena pentingnya istilah-istilah tersebut, maka tidak salah jika para pendiri Negara ini memasukkan kata-kata tersebut ke dalam dasar Negara Indonesia, Pancasila. Seperti istilah “adil” dan “adab” dalam sila kedua Pancasila. Masuknya istilah “adab” merupakan indikasi kuatnya pengaruh *Islamic worldview* (pandangan alam Islam) dalam rumusan Pembukaan UUD 1945. Karena berasal dari kosa kata Islam, maka seyogyanya istilah adab harus dipahami dalam perspektif pandangan alam (*worldview*) Islam. Karena pentingnya konsep adab tersebut, maka sudah saatnya konsep ini dipakai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis karakter.

Kata kunci: Adab, Pendidikan, Karakter, Pandangan Hidup Islam

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia memandang penting Pendidikan Karakter bagi kemajuan bangsa ke depan. Tahun 2011, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Nasional (sekarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), mengeluarkan buku kecil berjudul *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*.¹

Kepala Balitbang Depdiknas, Prof. Dr. Mansur Ramly, menuliskan dalam kata pengantarnya untuk buku tersebut:

“Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi

¹ Bagian ini merujuk pada buku *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendiknas, 2011.

upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945."

Masih menurut Prof. Dr. Mansur Ramly, berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini, semakin mendorong semangat dan upaya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan karakter sebagai dasar pembangunan pendidikan. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya ditegaskan lagi:

"Upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini tentu tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar dan luar sekolah, akan tetapi juga melalui pembiasaan (*habituaasi*) dalam kehidupan, seperti: religius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-jawab, dan sebagainya. Pembiasaan itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang hal-hal yang benar dan salah, akan tetapi juga mampu merasakan terhadap nilai yang baik dan tidak baik, serta bersedia melakukannya dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu ditumbuhkembangkan peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi cerminan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekolah memiliki peranan yang besar dalam pengembangan pendidikan karakter karena peran sekolah sebagai pusat pembudayaan melalui pendekatan pengembangan budaya sekolah (*school culture*)."

Jadi, pendidikan karakter, bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, menurut buku Panduan ini, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2)

membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Sedangkan fungsi Pendidikan karakter adalah (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Disebutkan, bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggungjawab.²

Tekad pemerintah untuk menerapkan kebijakan pendidikan berbasis karakter bisa dimaklumi, mengingat sudah banyak pihak mengkhawatirkan tentang masa depan Bangsa Indonesia, karena memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang atau rendah karakternya. Padahal, kemajuan suatu bangsa terbukti lebih disebabkan oleh keunggulan SDM-nya, ketimbang keunggulan SDA (Sumber Daya Alam)-nya. Sebuah kritik keras terhadap karakter Bangsa Indonesia pernah dilontarkan oleh budayawan Mochtar Lubis dalam ceramahnya di Taman Ismail Marzuki, 6 April 1977. Ketika itu, Mochtar Lubis mendeskripsikan ciri-ciri umum manusia Indonesia sebagai berikut: munafik, enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal, masih percaya takhayul, lemah karakter, cenderung boros, suka jalan pintas, dan sebagainya.³

Salah satu negara yang disebut-sebut telah sukses dalam menerapkan pendidikan berbasis karakter adalah RRC. Pemimpin Cina, Deng Xiaoping, pada tahun 1985 sudah mencanangkan

² Pusat Kurikulum. *Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. 2009: 9-10.

³ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

pentingnya pendidikan karakter: *"Throughout the reform of the education system, it is imperative to bear in mind that reform is for the fundamental purpose of turning every citizen into a man or woman of character and cultivating more constructive members of society."* Li Lanqing, mantan wakil PM Cina, dalam bukunya, *Educations for 1.3 Billion*, menjelaskan reformasi pendidikan yang dijalankan di Cina. Ia menulis: *"After many years of practice, character education has become the consensus of educators and people from all walks of life across this nation. It is being advanced in a comprehensive way."*⁴

Apresiasi dan Kritik

Program pemerintah RI tentang pendidikan berbasis karakter patut diapresiasi, sebab kemajuan seseorang atau suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter manusia atau bangsa tersebut. Syekh al-Amir Syakib Arsalan, dalam analisisnya tentang kemunduran Umat Islam menyebutkan salah satu faktor kekalahan umat Islam adalah rendahnya semangat berkorban. Dalam surat balasannya kepada Syekh Basyuni Imran dari Kalimantan, Syekh Syakib Arsalan menulis:

*"Tuan mengetahui, bahwa keadaan tentara mereka (bangsa Eropa) datang berduyun-duyun menuju ke tempat kematian (ke medan perang) dengan berebutan, dan mereka berdesakan untuk menyerbu dengan hebatnya ke gelanggang pertempuran dalam perang dunia yang lalu, pula mereka berkorban dalam perang dunia itu dengan pengorbanan yang melebihi daripada yang telah digambarkan oleh pikiran manusia biasa."*⁵

Pada 17 Agustus 1951, hanya 6 tahun setelah kemerdekaan RI, M. Natsir melalui sebuah artikelnya yang berjudul "Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawa Hanyut", Natsir mengingatkan bahaya besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu mulai memudarnya semangat pengorbanan. Melalui artikelnya ini, Natsir menggambarkan betapa jauhnya kondisi manusia Indonesia pasca kemerdekaan dengan pra-kemerdekaan. Sebelum kemerdeka-

⁴ Dikutip dari Ratna Megawangi, *Semua Berakar Pada Karakter* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007).

⁵ Al-Amir Syakib Arsalan, *Mengapa Kaum Muslimin Mundur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 14. Buku ini asalnya merupakan jawaban Syekh Arsalan terhadap surat Syekh Basyuni Imran, di awal abad ke-20, yang bertajuk *"Limâzâ Ta'akhhara al-Muslimûn, wa Limâdzâ Taqaddama Gairuhum)*, dialihbahasakan oleh KH. Munawar Chalil.

an, kata Natsir, bangsa Indonesia sangat mencintai pengorbanan. Hanya enam tahun sesudah kemerdekaan, segalanya mulai berubah. Natsir menulis:

“Dahulu, mereka girang gembira, sekalipun hartanya habis, rumahnya terbakar, dan anaknya tewas di medan pertempuran, kini mereka muram dan kecewa sekalipun telah hidup dalam satu negara yang merdeka, yang mereka inginkan dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampau... Semua orang menghitung pengorbanannya, dan minta dihargai...Sekarang timbul penyakit bakhil. Bakhil keringat, bakhil waktu dan merajalela sifat serakah... Tak ada semangat dan keinginan untuk memperbaikinya. Orang sudah mencari untuk dirinya sendiri, bukan mencari cita-cita yang diluar dirinya...”

Lalu, untuk memajukan bangsa, Mohammad Natsir berpesan:

“Untuk ini perlu saudara berdayung. Untuk ini saudara harus berani mencururkan keringat. Untuk ini saudara harus berani menghadapi lapangan perjuangan yang terbentang di hadapan saudara yang masih terbengkalai... Perjuangan ini hanya dapat dilakukan dengan enthousiasme yang berkobar-kobar dan dengan keberanian meniadakan diri serta kemampuan untuk merintiskan jalan dengan cara berencana. Usaha besar yang kita hadapi pada waktu ini, telah pernah kita hadapi dengan kerelaan menerima segenap konsekuensinya. Dan perjuangan yang terbentang di hadapan kita ini, tidak kurang berkehendak kepada keberanian untuk menegakkan kedudukan bangsa dan falsafah hidupnya, juga dengan segenap konsekuensinya dengan berupa “keringat, air mata dan darah”.”⁶

Seperti dikhawatirkan Mochtar Lubis, salah satu karakter yang menonjol pada manusia Indonesia adalah lemah karakternya. Jika karakter yang lemah seperti ini dibiarkan dan tidak dilatih agar berangsur-angsur menjadi semakin kuat, maka masa depan bangsa juga mengkhawatirkan. Umat Islam, sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia seharusnya menjadi umat yang paling menonjol karakternya. Allah Berfirman, “*Kamu adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kamu beriman kepada Allah.*” (QS 3:110).

Umat Islam adalah umat yang mulia. Umat yang disertai tugas mewujudkan *rahmatan li al-âlamîn*, memakmurkan bumi dan

⁶ M. Natsir, *Capita Selecta 2*, Cet. II, (Jakarta: PT Abadi, 2008), 76-79.

mewujudkan keselamatan bagi manusia, di dunia dan akhirat. Umat Islam akan menjadi saksi atas manusia. Sebab kata Nabi SAW, "*al-Islâmu ya'lû wa lâ yu'lâ alaihi*". (Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam).

Begitulah yang sering kita dengar dari ayat-ayat maupun Hadis Nabi SAW. Dulu, generasi-generasi pertama Umat Islam, masa sahabat, dan tabiin, tentu tidak sulit mengerti makna ayat-ayat tersebut. Saat itu mereka memang benar-benar menjadi umat yang disegani. Sering kita dengar musuh-musuh Islam sudah gemetar duluan tatkala mendengar tentara Islam datang. Dalam benak mereka terdapat persepsi: tentara Islam tidak dapat dikalahkan. Menghadapi apapun, Umat Islam kala itu tidak gentar. Kisah populer, seorang tentara Islam saat Perang Qadisiyyah, sendirian masuk ke Istana Rustum, panglima tentara Persia, tanpa sedia menundukkan kepala. Bahkan kudanya pun dibawanya masuk, menginjak-injak karpet istana yang indah. Juga tengoklah bagaimana seorang Ja'far bin Abi Thalib, dalam keadaan terjepit mampu mengeluarkan argumen-argumen jitu di hadapan Raja Najasi dan pembesar-pembesar Habasyah, saat Hijrah pertama. Kaum Muslim di bawah Khalifah Muhammad al-Fatih dengan gagah berani menaklukkan ibukota Romawi, Konstantinopel (sekarang Istanbul), sebuah imperium yang besar dan hebat di dunia tanggal 29 Maret 1453.

Karena itu, memang bisa dikatakan, masa depan Umat Islam dan Bangsa Indonesia, akan ditentukan oleh berhasil atau tidaknya pendidikan berbasis karakter atas mereka. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah: "Pendidikan Karakter seperti apa?"

Tentu, sebagai Bangsa yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (bertauhid), maka tidak sepatutnya Bangsa Indonesia mengembangkan konsep Pendidikan Karakter yang ateis atau sekuler.⁷ Seyogyanya, pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia, khususnya untuk Umat Islam, haruslah pendidikan karakter berbasis Tauhid. Jika Bangsa Cina, Jepang, AS, dan sebagainya, maju sebagai hasil pendidikan karakter, tentulah Bangsa Indonesia harus memiliki karakter yang lebih baik, tanpa perlu menjadi komunis, ateis, atau sekuler. Dalam perspektif Tauhid inilah, tampak sejumlah ketidakjelasan dan kerancuan dalam konsep

⁷ Tentang arti Pancasila, lihat Adian Husaini, *Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).

Pendidikan Karakter yang diajukan pemerintah. Misalnya, disebutkan, bahwa

“Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945”

Jika ditanyakan, apa makna ungkapan “akhlak mulia”, “moral”, “etika”, “adab”, menurut Falsafah Pancasila? Apakah Pancasila bisa dijadikan sebagai landasan untuk berakhlak mulia? Jika bisa, bisakah dijelaskan bagaimana berakhlak mulia sesuai Pancasila? Bisakah dijelaskan, bagaimana cara menggosok gigi yang baik menurut Falsafah Pancasila?

Juga disebutkan, misalnya, tujuan Pendidikan Karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Menjadikan Pancasila sebagai pedoman pembentukan karakter bangsa akan menimbulkan persoalan serius, karena akan terjadi benturan dengan agama. Pancasila seyogyanya tidak dijadikan sebagai pedoman amal atau pedoman karakter. Sebab, itu adalah wilayah agama. Jika Pancasila akan ditempatkan sebagai pedoman karakter atau moral, maka akan menjadi pedoman baru, yang menggantikan posisi agama. Hal itu tidak akan berhasil, sebab Pancasila tidak memiliki sosok panutan ideal yang bisa dijadikan contoh dalam pembentukan karakter. Berbeda dengan Islam, yang memiliki suri tauladan yang jelas dan abadi, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Seharusnya, Bangsa Indonesia belajar dari kegagalan Orde Baru dalam upaya penempatan Pancasila sebagai pedoman amal. Upaya Pemerintah Orde Baru untuk menempatkan Pancasila menjadi landasan moral melalui sosialisasi dan indoktrinasi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tahun 1978, Partai Persatuan Pembangunan menolak pengesahan Tap MPR tentang P4. Tokoh Masyumi, Sjafroedin

Prawiranegara juga berkirim surat kepada Presiden Soeharto tanggal 7 Juli 1983, yang menyatakan, bahwa tidak ada yang namanya moralitas Pancasila, karena urusan moral sudah ada dalam agama masing-masing. Sjafroedin menekankan, bahwa Pancasila adalah asas negara dan landasan konstitusi. Prof. HM. Rasjidi juga berpendapat, P4 membahayakan keberadaan Islam. Misalnya, ajaran tentang kerukunan beragama telah dipergunakan untuk membelenggu umat Islam supaya tidak menentang pemurtadan umat Islam oleh aliran kebatinan dan kristenisasi. Ada juga tokoh yang menulis bahwa P4 memberikan perlindungan terhadap aliran kepercayaan dan menyingkirkan kaitan historis kedudukan Umat Islam dalam kerangka ideologi Pancasila. P4 dipandang sebagai manipulasi dan pemusatan penafsiran ideologi negara oleh penguasa tanpa mengaitkan asas-asas ajaran agama, terutama Islam. Memang, sejak tahun 1975, PMP wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Sejak ditetapkan MPR, maka Penataran P4 diwajibkan untuk pegawai negara dan mahasiswa. Menurut Riswanda Imawan, penataran P4 dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya ideologi Islam. Ada juga yang menyebut proses Pancasilaisasi mempunyai implikasi "deislamisasi". Juga, menurut Leifer, salah satu fungsi Pancasila adalah untuk melindungi identitas budaya kelompok abangan. Muhammad Natsir menyebut diberlakukannya pelajaran PMP di sekolah-sekolah merupakan bentuk pendangkalan agama dan penyamaan agama dengan Pancasila.⁷

Di Majalah *Panji Masyarakat* edisi 328/1981, Ridwan Saidi kembali menulis kolom berjudul "Gejala Perongrongan Agama". Lagi-lagi, politisi yang juga dikenal sebagai budayawan Betawi ini mengupas dengan sangat tajam kebijakan Prof. Dardji Darmodiharjo.

⁷ Setelah Tap MPR No II/1978 disahkan, sebagian kalangan Muslim kemudian mencoba mewarnai konsep P-4 itu dengan corak pandang Islam. Tahun 1978, Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI menerbitkan sebuah buku kecil berjudul *P-4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Islam*. Ketika menjelaskan tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dikutiplah QS. al-Ikhlâs (112), dan sejumlah ayat al-Qur'an lainnya untuk mendukung pengertian tersebut. Dalam sambutannya untuk buku ini, Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menyatakan, bahwa "Pengamalan Pancasila bukan lagi masalah bagi umat beragama khususnya umat Islam, karena memang para perumusny dahulu juga tidak sedikit adalah tokoh-tokoh Islam selain tokoh-tokoh nasional yang juga umat Islam terkemuka." (Komentar: Tampaknya, langkah Menteri Agama tersebut lebih berbau politis, untuk merebut makna Pancasila dengan kelompok lain yang memberi penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ala Islam. Hal ini akan tampak pada percaturan politik nasional pada dekade 1970 dan 1980-an, dimana kubu sekular – yang antara lain diwakili oleh Menteri P&K Daed Joesoef – semakin lama semakin tersingkir dari pusaran kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto).

Beginilah antara lain gambaran yang diberikan Ridwan Saidi tentang Prof. Dardji:

“Saya memandang sosok tubuhnya pertama kali adalah pada kuartal terakhir tahun 1977 pada Sidang Paripurna Badan Pekerja MPR, waktu itu Prof. Dardji menyampaikan pidato pemandangan umumnya mewakili Fraksi Utusan Daerah. Pidatonya menguraikan tentang falsafah Pancasila. Sudah barang tentu uraiannya itu bertitik tolak dari pandangan diri pribadinya belaka. Dan sempat pula pada kesempatan itu Prof. Dardji menyampaikan kejengkelannya ketika katanya pada suatu kesempatan dia selesai ceramah tentang sikap hidup Pancasila, seorang hadirin bertanya padanya bagaimana cara gosok gigi Pancasila.”⁸

Jika pendidikan karakter didasarkan kepada falsafah Pancasila yang tidak dijelaskan maknanya maka, sudah barang tentu, pendidikan karakter itu berpijak di atas fondasi yang rapuh. Seharusnya, pendidikan karakter di Indonesia dilaksanakan – khususnya bagi Kaum Muslim – dengan berdasarkan kepada konsep Tauhid. Itulah sebenarnya makna dan konsep yang paling tepat bagi pendidikan Karakter di Indonesia, sesuai dengan makna Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Musyawaharah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiul Awal 1404 H/ 21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, yang antara lain menegaskan: (1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.⁹

⁸ Lihat, Ridwan Saidi, *Islam dan Moralitas Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 11.

⁹ Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009). Lihat juga, Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS (ed), *Menghidupkan Pemikiran KH Achmad Siddiq*, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2002), 118-145; M. Ali Haidar, dalam bukunya,

Jadi, menurut keputusan Munas alim ulama tersebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bermakna tauhid dan menjiwai sila yang lain. Tauhid di sini juga ditegaskan: “menurut pengertian keimanan dalam Islam”. Pemahaman bahwa sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dimaknai sebagai tauhid dalam Islam, bukanlah klaim kosong. Para tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila itu sendiri sudah menegaskan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memang harus dimaknai tauhid. Mohammad Hatta yang giat melobi para tokoh Islam agar rela menghapus tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya), dari sila pertama dan menggantinya dengan “Yang Maha Esa” menegaskan, bahwa pengertian “Ketuhanan Yang Maha Esa” memang tauhid dalam ajaran Islam.

Sebenarnya, terlepas dari agama dan ideologi masing-masing, harusnya bangsa Indonesia mau bersikap jujur, bahwa rumusan Pancasila yang berlaku sekarang ini, tidaklah terpisahkan dari rumusan Pembukaan UUD 1945, yang kini berlaku kembali sebagai hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena itu, dalam memahami sila Pertama, misalnya, tidak boleh dilepaskan dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”. Jadi, sila pertama, menurut berbagai tokoh organisasi Islam, bisa dikatakan sebagai penegasan konsep Tauhid dalam Islam, sebab dalam alinea ketiga jelas-jelas disebutkan nama Tuhan yang Esa yaitu *Allah*.

Dalam buku *Hidup Itu Berjuang*, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Prof. Kasman Singodimedjo menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.”¹⁰

Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), memberikan komentar terhadap keputusan Munas Alim Ulama tersebut: “Penegasan ini sebenarnya bukannya tidak terduga. Seperti dikemukakan Hatta ketika bertemu dengan beberapa pemimpin Islam tanggal 18 Agustus 1945 menjelang sidang PPKI untuk mengesahkan UUD, mereka dapat menerima penghapusan ‘tujuh kata’ yang tercantum dalam Piagam Jakarta, karena dua alasan. Pertama, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan monoteisme tauhid dalam Islam. Kedua, demi menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya... Salah seorang yang dipandang Hatta berpengaruh dalam kesepakatan ini ialah Wachid Hasjim, tokoh NU yang memiliki reputasi nasional ketika itu. Jadi rumusan deklarasi itu hakekatnya menegaskan kembali apa yang telah disepakati sejak negara ini baru dilahirkan tanggal 18 Agustus 1945 yang lalu.” (hal. 285-286).

¹⁰ Lihat, Kasman Singodimedjo, *Hidup Itu Berjuang*, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 123-125.

Karena itu, sudah sepatutnya, pendidikan karakter di Indonesia memang didasarkan kepada konsep tauhid. Sebagai aplikasinya, karakter “toleransi”, misalnya, harus diberi batasan, bahwa Umat Islam, tidak boleh bertoleran terhadap kemusyrikan dan kemungkarannya. Dalam tataran kebangsaan, sudah sepatutnya, negara tidak memfasilitasi berkembangnya paham-paham syirik yang bertentangan dengan konsep Tauhid. Untuk itu, keliru, jika siswa diajarkan agar bertoleran terhadap semua aliran keagamaan atau jenis pemikiran. Yang benar adalah, anak-anak Muslim ditanamkan untuk memiliki karakter yang kuat dalam toleransi tetapi tanpa merusak akidahnya.

Pendidikan Adab

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988) dan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1976) susunan W.J.S. Poerwadarminta, kata “adab” didefinisikan sebagai: kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti, dan akhlak. Sedangkan “beradab” diartikan sebagai sopan, baik budi bahasa, dan telah maju tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan, mengartikan kata “adab” dengan “sopan” (lawan dari kata “biadab”). “Beradab” berarti baik budi bahasa.¹¹

Istilah “adab” tentu saja bukan hal yang asing bagi Bangsa Indonesia. Sebab, kata ini sudah terbiasa digunakan di tengah masyarakat dan juga tercantum dalam Pancasila, sila kedua, yaitu: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Masuknya istilah “adab” dalam Pancasila ini merupakan indikasi kuatnya pengaruh *Islamic worldview* (pandangan alam Islam) dalam rumusan Pembukaan UUD 1945, dimana terdapat rumusan Pancasila. Indikasi yang lebih jelas tentang kuatnya pandangan-alam Islam pada rumusan Pancasila adalah terdapatnya sejumlah istilah kunci dalam Islam lainnya, seperti kata “adil”, “hikmah”, “rakyat”, “daulat”, “wakil”, dan “musyawarah”.

Perlu dicatat, rumusan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat berbeda dengan rumusan yang pernah diusulkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, Muhammad Yamin, dalam Sidang BPUPK, tanggal 29 Mei 1945, mengusulkan rumusan sila keduanya: “Peri Kemanusiaan”. Soekarno, pada 1 Juni 1945, mengusulkan rumusan

¹¹ Dikutip dari Usman Syihab, *Membangun Peradaban dengan Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 77-78.

silanya kedua: "Internasionalisme atau Perikemanusiaan." Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 memuat rumusan sila kedua: "Peri Kemanusiaan". Rumusan "Peri Kemanusiaan" ini juga diteruskan dalam Konstitusi UUDS, 1950 sampai 5 Juli 1959.¹²

Dengan mencermati berbagai rumusan sila kedua yang pernah diusulkan atau dicantumkan dalam beberapa Konstitusi RI, tampak bahwa dua istilah – "adil" dan "adab" – ini jelas berasal dari kosakata Islam, yang memiliki makna khusus (*iṣṭilâhan*) dan hanya bisa dipahami dengan tepat jika dirunut pada pandangan-dunia Islam. Kedua istilah tersebut jelas tidak ditemukan dalam tradisi Indonesia asli, sebelum kedatangan Islam. Adil adalah istilah "khas" yang terdapat dalam banyak sekali ayat al-Qur'an. Sebagai contoh dalam al-Qur'an Allah berfirman, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat dan melarang dari yang keji, dan yang dibenci, dan aniaya. Allah mengingatkan kalian, supaya kalian ingat.*" (QS. 16:90).

Prof. Hamka, dalam *Tafsir Al-Azhar*, menjelaskan tentang makna adil dalam ayat ini, yaitu "menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya." Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkirkan kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. "Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai," tulis Hamka.¹³

Jadi, adil bukanlah sama rata-sama rasa. Konsep adil adalah konsep khas Islam yang oleh orang Islam, seharusnya dipahami dari perspektif pandangan-dunia Islam, karena konsep ini terikat dengan konsep-konsep Islam lainnya. Jika konsep adil dipahami dalam kerangka pandangan-alam Barat (*western worldview*), maka akan berubah maknanya. Sejumlah aktivis Kesetaraan Gender, yang berpedoman pada "setara" menurut pandangan Barat, misalnya, mulai menggugat berbagai ajaran Islam yang dinilai menerapkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dipertanyakan,

¹² Kaelani, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010, edisi ke-9), 24-27.

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997).

mengapa akikah untuk bayi laki-laki, misalnya, adalah dua kambing dan akikah untuk bayi perempuan adalah 1 kambing. Konsep itu dinilai tidak adil dan diskriminatif. Dalam Islam, laki-laki berhak menjadi imam shalat bagi laki-laki dan perempuan adalah adil. Menurut konsep yang lain, bisa dikatakan tidak adil. Dalam pandangan demokrasi Barat, tidak ada perbedaan antara hak “orang jahat” dengan “orang baik” dalam kesaksian dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Bagi hukum pidana yang berlaku sekarang, dianggap adil jika Presiden – yang tidak ada hubungan keluarga apa pun – berhak memberikan grasi kepada seorang terhukum. Tetapi, dalam Islam, yang lebih adil adalah jika hak pengampunan itu diberikan kepada keluar korban kejahatan. Jadi, kata adil, memang sangat beragam maknanya, tergantung pandangan-dunia apa yang digunakan.

Sejumlah kalangan, dengan alasan HAM, menilai aturan Islam tidak adil, karena melarang wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Juga dengan dasar yang sama, mereka menuntut keadilan, agar kaum homoseksual dan lesbian juga diberikan hak yang sama untuk diakui keabsahan pernikahan mereka, sebagaimana pernikahan kaum hetero. Lama-lama, bisa juga mereka menuntut hak untuk pengesahan perkawinan manusia dengan binatang, dengan alasan, tidak mengganggu orang lain. Ada juga tuntutan hak untuk mati, sebagaimana hak untuk hidup, dan sebagainya. Karena itu, jika istilah “adil” dalam sila kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – dilepaskan maknanya dari sudut pandangan-alam (*worldview*) Islam, maka akan terlepas pula maknanya yang hakiki, sebagaimana dimaksudkan oleh para perumus Pancasila itu sendiri.

Bagi Kaum Muslim, khususnya, Prof. Naquib al-Attas mengingatkan perlunya memperhatikan masalah penggunaan bahasa atau istilah-istilah dasar dalam Islam dengan benar agar jangan sampai terjadi kekeliruan yang meluas dan kesilapan dalam memahami Islam dan pandangannya tentang hakikat dan kebenaran. Menurut Prof. Naquib, banyak istilah kunci dalam Islam yang kini menjadi kabur dipergunakan sewenang-wenang, sehingga menyimpang dari makna yang sebenarnya. Ia menyebutnya sebagai penafi-islaman bahasa (*de-Islamization of language*). Contoh kasus penafi-islaman bahasa adalah pemaknaan istilah “keadilan” yang diartikan sebagai “tiada menyebelahi mana-mana pihak, dan menyamaratakan taraf tanpa batasan, atau sebagai tata cara belaka. Contoh lain, penyalahpahaman makna istilah “adab”, yang diartikan hanya sebagai adat

peraturan mengenai kesopanan, yang lazimnya merupakan amalan berpura-pura sopan.¹⁴

Makna Adab

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka"*. Dalam hadis lain juga disebutkan, *"Jika seseorang mendidik anaknya (menjadikan anaknya beradab), maka itu lebih baik baginya daripada bersedekah setiap harinya setengah sha'"*. (HR Imam Ahmad)

Istilah "adab" dalam kedua Hadis Nabi SAW tersebut identik dengan istilah pendidikan saat ini. Karena itulah, istilah "adab" juga merupakan salah satu istilah kunci dalam Islam. Para ulama telah banyak membahas makna adab dalam pandangan Islam. Di Indonesia, K.H. M. Hasyim Asy'ari, Pendiri NU, menulis sebuah buku berjudul *Āḍab al-Ālim wa al-Muta'allim* (edisi Indonesia: *Etika Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007). Terjemahan harfiahnya: *Adab Guru dan Murid*. Buku ini membahas secara panjang lebar tentang masalah adab. Kyai Hasyim Asy'ari membuka kitabnya dengan mengutip hadis Rasulullah SAW: *"Hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, pengasuhan yang baik, dan adab yang baik."* Dikutip juga perkataan sejumlah ulama. Hasan al-Bashry misalnya, yang menyatakan: *"Hendaknya seseorang senantiasa mendidik dirinya dari tahun ke tahun."*

Habib bin al-Syahid suatu ketika menasehati putranya: Bergaullah engkau dengan para fukaha serta pelajarilah adab mereka. Sesungguhnya yang demikian itu akan lebih aku cintai daripada banyak hadis." Ruwaim juga pernah menasehati putranya: *"Wahai putraku, jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu sebagai tepung."* Ibn al-Mubarak menyatakan bahwa mempunyai adab meskipun sedikit lebih dibutuhkan daripada banyak ilmu pengetahuan.

Suatu ketika Imam Syafii pernah ditanya oleh seseorang: *"Sejauh manakah perhatianmu terhadap adab?"* Beliau menjawab: *"Se-*

¹⁴ Lihat, Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam* (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2007), 60. Secara khusus, Prof. Naquib al-Attas mengingatkan: *"Many major key terms in the Islamic basic vocabulary of the languages of Muslim peoples have now been displaced and made to serve absurdly in alien fields of meaning. This modern cultural phenomenon is what is causing the confusion of the Muslim mind. It is a kind of regression towards non-Islamic worldviews; it is what I call the de-islamization of language."* Lihat, S.M.N. al-Attas, *The Concept of Education in Islam*, (Petaling Jaya: ABIM, 1980), 11.

tiap kali telingaku menyimak suatu pengajaran budi pekerti meski hanya satu huruf, maka seluruh organ tubuhku akan ikut merasakan (mendengarnya) seolah-olah setiap organ itu memiliki alat pendengaran (telinga). Demikianlah perumpamaan hasrat dan kecintaanku terhadap pengajaran budi pekerti.” Beliau ditanya lagi, “Lalu bagaimanakah usaha-usaha dalam mencari adab itu?” Beliau menjawab, “Aku akan senantiasa mencarinya laksana usaha seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang.”

Maka, dalam bukunya ini, Kyai Hasyim Asy’ari menuliskan kesimpulan:

Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagian ulama lain menjelaskan, “Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah mengharuskannya beriman kepada Allah (yakni dengan membenarkan dan meyakini Allah tanpa sedikit pun keraguan). Karena, apabila ia tidak memiliki keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat (hukum-hukum Islam) dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Begitu pun dengan pengamalan syariat, apabila ia mengamalkannya tanpa dilandasi adab, maka pada hakikatnya ia belum mengamalkan syariat, dan belum dianggap beriman serta bertauhid kepada Allah.

Berdasarkan beberapa hadits Rasulullah saw dan keterangan para ulama di atas, kiranya tidak perlu kita ragukan lagi betapa luhurnya kedudukan adab di dalam ajaran agama Islam. Karena, tanpa adab dan perilaku yang terpuji maka apa pun amal ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan diterima di sisi Allah SWT (sebagai satu amal kebaikan), baik menyangkut amal *qalbiyah* (hati), *badaniyah* (badan), *qauliyah* (ucapan), maupun *fi’liyah* (perbuatan). Dengan demikian, dapat kita maklumi bahwa salah satu indikator amal ibadah seseorang diterima atau tidak di sisi Allah SWT adalah melalui sejauh mana aspek adab disertakan dalam setiap amal perbuatan yang dilakukannya.¹⁵

Demikianlah penjelasan KH. Hasyim Asy’ari tentang makna adab. Menyimak paparan pendiri NU tentang adab tersebut, maka tidak bisa tidak, kata “adab” memang merupakan istilah yang khas maknanya dalam Islam. Adab terkait dengan iman dan ibadah dalam Islam. Adab bukan sekedar “sopan santun” atau baik budi bahasa.

¹⁵ K.H. M. Hasyim Asy’ari, *Etika Pendidikan Islam (terj.)*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007).

Oleh karena itu tentunya sangat masuk akal jika orang Islam memahami kata "adab" dalam sila kedua itu sebagaimana dipahami oleh sumber-sumber ajaran Islam dan para ulama Islam. Sebab, memang itu istilah yang sangat khas dalam Islam.

Jika adab hanya dimaknai sebagai "sopan-santun", maka bisa-bisa ada orang yang menyatakan, Nabi Ibrahim AS sebagai orang yang tidak beradab, karena berani menyatakan kepada ayahnya, "*Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata.*" (QS. 6:74). Bisa jadi, jika hanya berdasarkan sopan santun, tindakan mencegah kemunkaran (*nahyu 'an al-munkar*) akan dikatakan sebagai tindakan tidak beradab. Sebagian malah ada yang menganggap, menanyakan identitas agama pada seseorang dianggap tidak sopan. Banyak yang menganggap tentang dosa zina, dan dianggap tidak etis jika masalah itu diangkat ke permukaan, sementara masalah korupsi harta bisa diangkat ke permukaan.

Karena itulah, menurut Islam - sekali lagi menurut ajaran Islam - harkat dan martabat sesuatu adalah berdasarkan pada ketentuan Allah, dan bukan pada manusia atau budaya. Sebagai contoh, kriteria orang yang mulia, menurut al-Qur'an adalah orang yang paling takwa (QS. 49:13). Oleh karena itu, seharusnya, dalam masyarakat yang beradab, Kaum Muslim harus menghormati seseorang karena keimanan dan ketakwaannya; bukan karena jabatannya, kekayaannya, kecantikannya, atau popularitasnya. Itu baru namanya beradab, menurut al-Qur'an. Begitu juga ketika al-Qur'an memuliakan orang yang berilmu (QS. 35:28, 3:7, 58:11), maka sesuai konsep adab, seorang Muslim wajib memuliakan orang yang berilmu dan terlibat dalam aktivitas keilmuan. Masyarakat yang beradab juga masyarakat yang menghargai aktivitas keilmuan. Tentu menjadi tidak beradab, jika aktivitas keilmuan dikecilkan, sementara aktivitas hiburan diagung-agungkan. Tidak mungkin suatu bangsa akan maju jika tidak menjadikan tradisi ilmu sebagai bagian dari tradisinya. Al-Qur'an sangat menekankan, bahwa ada perbedaan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. "*Katakanlah, tidaklah sama, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu.*" (QS. 39:9). "*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat.*" (QS. 58:11).

Karena itulah, Allah mengecah keras orang-orang yang tidak menggunakan segala potensinya untuk berpikir dan meraih ilmu. Orang-orang seperti ini, dalam al-Qur'an, disamakan derajatnya

dengan binatang ternak:

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia; mereka mempunyai *qalb* tapi tidak untuk memahami (ayat-ayat Allah), dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak digunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (QS 7:179).

Bangsa Indonesia tidak mungkin akan menjadi bangsa besar jika mengabaikan tradisi ilmu yang benar sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an ini. Dalam perspektif Islam, manusia beradab haruslah yang menjadikan aktivitas keilmuan sebagai aktivitas utama mereka. Sebab seorang Muslim senantiasa berdoa: “*Rabbi zidniy 'ilman*” (Ya Allah, tambahkanlah ilmuku). Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa, agar ilmu yang dikejar dan dimiliki seorang Muslim adalah ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan ilmu-lah, maka manusia dapat meraih adab, sehingga dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai ketentuan Allah SWT. Inilah konsep adab sebagaimana dipahami oleh Kaum Muslim.

Dengan demikian, jika ditelaah, adalah sangat masuk akal menghipotesakan, bahwa masuknya kata “adil” dan “adab” dalam sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab* adalah usulan para tokoh Islam yang duduk dalam “Panitia Sembilan”. Perlu dicatat, bahwa sebelum “Panitia Sembilan” bermusyawarah, Soekarno dan Muhammad Yamin sudah mengajukan asas atau dasar “peri-kemanusiaan” sebagai salah satu asas atau dasar dari Dasar Negara Indonesia. Mengapa, misalnya, sila kedua itu tidak berbunyi: *Kemanusiaan yang sopan dan berbudi? Atau Kemanusiaan yang sopan dan santun?* Atau, hanya berhenti pada istilah *kemanusiaan*. Jika demikian, maka akan sangat mungkin kata ini dimaknai secara fleksibel dan netral agama. Inilah yang secara mendasar digugat oleh Mohammad Natsir dalam pidatonya di Majelis Konstituante, “*Di mana sumber perikemanusiaan itu?*” Bagi yang memegang nilai-nilai relativisme dalam kebenaran dan moral, maka makna “kemanusiaan” akan memiliki makna yang nisbi dan tidak absolut, tergantung pada tradisi atau kesepakatan suatu masyarakat. Seperti disinggung sebelumnya, jika masyarakat tidak berkeberatan dengan budaya pornografi dan pornoaksi, maka nilai itu akan dianggap sebagai

kebenaran. Orang yang menentang tradisi masyarakat tersebut bisa dikatakan manusia tidak beradab. Begitu juga ketika suatu masyarakat menerima praktik pelacuran, perjudian, atau minuman keras, maka itu dianggap sebagai nilai yang benar. Menurut kaum relativis ini, tidak ada nilai yang tetap sepanjang zaman dan sembarang tempat. Nilai selalu berubah. Batasan aurat wanita, misalnya, menurut mereka, tidak ada yang tetap, tetapi berdasarkan budaya setempat. Apa yang sopan dan tidak sopan, ditentukan oleh tradisi dan kesepakatan dan konsensus. Tentu saja, konsep semacam ini sangat berbeda dengan konsep Islam.

Karena itulah, masuknya kata "adil" dan "adab" dalam sila kedua dari Pancasila semakin memperkuat bahwa Pancasila bukanlah konsep yang netral agama. Tampak, pandangan-dunia Islam yang dibawa oleh para tokoh perumusannya, terutama KH. Wachid Hasyim (Putra KH. Hasyim Asy'ari), Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abikusno Tjokrosuyoso, cukup mewarnai rumusan Pancasila, sehingga sangat tidak keliru jika umat Islam memberi makna adil dan adab sesuai dengan makna dalam Islam, bukan makna yang netral agama. Sebab, jika istilah adil dan adab diletakkan dalam bingkai atau perspektif pandangan-dunia sekular atau netral agama, maka kata itu juga tidak akan bermakna sesuai dengan makna asalnya. Dengan demikian, adalah tidak *fair*, tidak adil dan tidak beradab, jika orang Islam memberi makna adil dan adab dilepaskan dari pandangan-alam Islam. Bisa dipastikan, sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, kedua istilah tersebut tidak dikenal di wilayah ini. Hingga kini, tidak ditemukan, terjemahan yang tepat dari kata adil dan adab ke dalam Bahasa Jawa, Minang, Sunda, Makasar, dan sebagainya.

Adab dan Tujuan Pendidikan

Uraian yang lebih rinci tentang konsep adab dalam Islam disampaikan oleh Prof. Naquib al-Attas. Menurutnya, adab adalah pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam rencana susunan berperingkat martabat dan derajat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta. Pengenalan adalah ilmu; pengakuan adalah amal, maka, pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal; dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu. Keduanya sia-sia karena yang satu mensifatkan keingkaran dan keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan ketidaksadaran dan kejahilan.

Lebih jauh, Prof. Naquib al-Attas menjelaskan, bahwa jatuh-bangunnya umat Islam, tergantung sejauhmana mereka dapat memahami dan menerapkan konsep adab ini dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, pakar filsafat Islam dan sejarah Melayu ini menjelaskan:

“Ta’rif adab yang dikemukakan di sini dan yang lahir dari pengertian Islam, dengan sendirinya menjelaskan bukan sahaja harus dia itu ditujukan maksud pengenaannya pada bangsa insani belaka; bahkan dia juga harus dikenakan pada keseluruhan alam tabi’i dan alam ruhani dan alam ilmi. Sebab, adab itu sesungguhnya suatu kelakuan yang harus diamalkan atau dilakukan terhadap diri, dan yang berdasarkan pada ilmu, maka kelakuan atau amalan itu bukan sahaja harus ditujukan kepada sesama insani, bahkan pada kenyataan makhluk jelata, yang merupakan ma’lumat bagi ilmu. Tiap sesuatu atau seseorang memiliki hak yang meletakkannya pada keadaan atau kedudukan yang sesuai bagin keperluannya. Ilmulah, dibimbing serta diyakini oleh hikmat, yang memberitahu atau memperkenalkan sehingga ketara tentang hak yang mensifatkan sesuatu atau seseorang itu; dan keadilan pula yang menjelaskan hukum tentang di manakah atau bagaimanakah letak keadaan atau kedudukannya. Apabila faham adab itu dirujukkan kepada sesama insan, maka dia bermaksud pada kesusilaan akhlakiah yang mencarakan kewajiban diri berperangai mengikut keperluan haknya dalam susunan berperingkat darjat yang terencana, umpamanya, dalam keluarga, dalam musharakat, dalam berbagai corak pergaulan kehidupan. Apabila dia dirujukkan pada alam ilmi pula, maka dia bermaksud pada ketertiban budi menyesuaikan haknya pada rencana susunan berperingkat martabat yang mensifatkan ilmu; umpamanya pengenalan serta pengakuan akan ilmu bahawa dia itu tersusun taraf keluhuran serta keutamaannya, dari yang bersumber pada wahyu ke yang berpunca pada perolehan dan perolahan akal; dari yang fardu ain ke yang fardu kifayah; dari yang merupakan hidayah bagi kehidupan ke yang merupakan kegunaan amali baginya. Dan adab terhadap ilmu itu iaitu mengenali serta mengakui taraf keluhuran serta keutamaan yang terencana pada ilmu, nescaya dapat menghasilkan dalam diri pencapaian yang seksama terhadap meramukan, menurut taraf keperluannya, pelbagai macam ilmu yang membina keadilan dalam diri. Dan keadilan dalam diri itu menyesuaikan haknya pada kewajiban membimbingnya ke arah pengenalan serta pengakuan akan ilmu yang bersumberkan wahyu, yang menyesuaikan hak diri jua, dan yang dengannya dapat menjelmakan

akibat amali dalam diri sehingga menyelamatkannya dunia-akhirat."¹⁶

Jadi, seperti ditegaskan oleh Prof. Naquib al-Attas, di dalam Islam, konsep adab memang sangat terkait dengan pemahaman tentang wahyu. Orang beradab adalah yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah. Di dalam Islam, orang yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, bisa dikatakan tidak adil dan tidak beradab. Sebab, di dalam al-Qur'an, syirik dikatakan sebagai kezaliman besar, seperti dikatakan Lukman kepada anaknya: "*Wahai anakku, janganlah kamu menseserikatkan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar.*" (QS. 31:13). Adalah tidak beradab mengangkat derajat makhluk ke derajat al-Khalik. Begitu juga menurunkan derajat al-Khalik ke derajat makhluk juga tindakan yang tidak beradab. Orang yang berilmu juga tidak sama derajatnya dengan orang bodoh. Begitu juga orang mukmin, tidak sama derajatnya dengan orang kafir (QS. 98; QS. 3:110, 119). Jadi, derajat manusia di hadapan Allah SWT tidaklah sama. Derajat seseorang di hadapan Allah tergantung pada keimanan dan ketakwaannya.

Konsep adab seperti ini sesuai dengan istilah dan tujuan Pendidikan Islam itu sendiri, yaitu *ta'dib* dan tujuannya adalah membentuk manusia yang beradab (*insan adaby*). Prof. Naquib al-Attas dalam bukunya, *Islam and Secularism*, menggariskan tujuan pendidikan dalam Islam tersebut: "*The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is therefore to produce a goodman... the fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab...*"¹⁷

¹⁶ Uraian selengkapnya tentang adab bisa dikaji dalam buku Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 118-120. Dalam rumusan lain, al-Attas mendefinisikan: "*Adab is recognition and acknowledgement of the reality that knowledge and being are ordered hierarchically according to their various grades and degrees of rank, and of one's proper place in relation to that reality and one's physical, intellectual and spiritual capacities and potentials.*" Lihat: Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam*, (Petaling Jaya: ABIM, 1980), 27.

¹⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2003), 150-151.

“Orang baik” atau *good man*, bisa dikatakan sebagai manusia yang memiliki berbagai nilai keutamaan dalam dirinya. Dengan berpijak kepada konsep adab dalam Islam, maka “manusia yang baik” atau “manusia yang beradab”, adalah manusia yang mengenal Tuhannya, mengenal dan mencintai nabinya, menjadikan Nabi SAW sebagai *uswah hasanah*, menghormati para ulama sebagai pewaris nabi, memahami dan meletakkan ilmu pada tempat yang terhormat – paham mana ilmu yang fardhu ain, dan mana yang fardhu kifayah; juga mana ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merusak – dan memahami serta mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan baik.

Penutup

Istilah adab sejatinya merupakan salah satu istilah kunci (*Islamic basic vocabulary*) dalam ajaran Islam, yang berhasil dimasukkan oleh para pendiri Bangsa Indonesia ke dalam Pancasila. Karena berasal dari kosa kata Islam, maka seyogyanya istilah adab yang sebenarnya juga harus dipahami dalam perspektif pandangan alam (*worldview*) Islam. Pemaknaan “adab” dengan sopan-santun, baik budi bahasa, tidak sesuai dengan makna istilah ini sendiri dalam ajaran Islam, yang pada intinya adalah memahami dan mengakui segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah SWT.

Karena pentingnya penegakan adab di tengah masyarakat Muslim, maka pakar pendidikan dan pemikiran Islam, Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas, sudah mengajukan istilah “ta’dib” untuk suatu proses pendidikan, yang tujuannya adalah membentuk manusia yang beradab, atau manusia yang baik (*a good man*). Dengan itu, tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang beradab. Adalah aneh, meskipun tercantum dalam Pancasila, konsep adab tidak dipahami sebagaimana mestinya. Karena pentingnya konsep adab ini, maka sudah saatnya pemerintah dan Umat Islam pada umumnya mengacu pada konsep adab dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis karakter.[]

Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1980. *The Concept of Education in Islam*. Petaling Jaya: ABIM.
- _____. 2001. *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- _____. 2003. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- _____. 2007. *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam*. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia,.
- Arsalan, Al-Amir Syakib. 1992. *Mengapa Kaum Muslimin Mundur*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy'ari, K.H. M. Hasyim. 2007. *Etika Pendidikan Islam (terj.)*. Yogyakarta: Titian Wacana.
- Bisri, A. Mustofa. 2009. "Pancasila Kembali" untuk buku As'ad Said Ali. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Haidar, M. Ali. 1994. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka. 1997. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Husaini, Adian. 2009. *Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kaelani. 2010. *Pendidikan Pancasila, Edisi Ke-9*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lubis, Mochtar. 2001. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Megawangi, Ratna. 2007. *Semua Berakar Pada Karakter*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Natsir, M. 2008. *Capita Selecta 2, Cet. II*. Jakarta: PT Abadi.
- Noeh, Munawar Fuad. dan Mastuki HS (ed.). 2002. *Menghidupkan Pemikiran KH Achmad Siddiq*. Jakarta: Pustaka Gramedia Utama.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang. 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kemendiknas.
- Pusat Kurikulum. 2009. *Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.

- Saidi, Ridwan. 1984. *Islam dan Moralitas Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Singodimedjo, Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syihab, Usman. 2010. *Membangun Peradaban dengan Agama*. Jakarta: Dian Rakyat.